

# JURNAL

## *Ekonomi Dan Manajemen*

(Journal of Economic and Management)

Hubungan Insentif dan Kepemimpinan Dengan Produktivitas Kerja Pemanen Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

*Indriana Faleary,  
Indrianty Sudirman,  
Yunus Musa*

Independensi Penyelenggara Pemilu pada Pemiluakada (Studi Kasus Pemiluakada Kabupaten Gowa)

*Risma Niswaty*

Kepemimpinan dalam Organisasi (Suatu Tinjauan Teoritis)

*Askar*

Pengaruh Kompetensi Manajerial Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Makassar

*Mukhtar Hamzah*

Evaluasi Pengelolaan Dana Komite untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) SMA Negeri 7 Makassar Periode 2006/2007-2010/2011

*Abdul Majid*

Analisis Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "SENTOSA" SMP Negeri 2 Unggulan Maros

*Yohanis Ta'bi*

Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah pada Praktisi Perbankan Syariah (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar)

*Ali Hasgar*

JURNAL  
EKONOMI DAN  
MANAJEMEN

No. 2

Vol. 8

Halaman :  
169 - 254

Makassar  
September 2012

ISSN  
1412 - 9914



Diterbitkan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS PATRIA ARTHA MAKASSAR



# **JURNAL**

## ***Ekonomi dan Manajemen***

### ***(Journal of Economic and Management)***

---

**Vol. 8 No. 2, September 2012**

**ISSN 1412-9914**

**Pimpinan/Pelaksana Redaksi:**  
Murbayani

#### **Dewan Redaksi**

**Ismanto Hadi Santoso**  
Universitas Narotama, Surabaya

**Samsubar Saleh**  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**John Suprihanto**  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**Summaryoto**  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Faried Wijaya Mansoer**  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**Arif Tiro**  
Universitas Negeri Makassar

#### **Asisten Redaksi:**

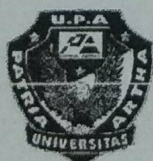
Nurmiati  
Fina Diana

#### **Administrasi dan Sirkulasi:**

Salmawati  
Irmayani

#### **Alamat Redaksi:**

Jl. Boeleward, Jascinth I No. 1 - 2 Panakkukang Mas Makassar  
Telp. (0411) 430135-434253, Fax. (0411) 434253  
E-Mail: [upa@patria-artha.ac.id](mailto:upa@patria-artha.ac.id)



Jurnal Ekonomi adalah media bagi akademisi, peneliti dan pihak-pihak lain dalam menyalurkan ide-pemikiran, solusi-pemecahan serta suatu penemuan cemerlang terhadap masalah ekonomi dan manajemen. Semoga melalui kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak, jurnal ini menjadi amalan ilmiah dari yang amaliah.



# **JURNAL**

## ***Ekonomi dan Manajemen***

### ***(Journal of Economic and Management)***

---

**Vol. 8 No. 2, September 2012**

**ISSN 1412-9914**

#### **DAFTAR ISI**

Hubungan Insentif Dan Kepemimpinan Dengan Produktivitas Kerja  
Pemanen Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

Indriana Faleary, Indrianty Sudirman, Yunus Musa 169 - 180

Independensi Penyelenggara Pemilu pada Pemilukada  
(Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Gowa)

Risma Niswaty 181 - 188

Kepemimpinan dalam Organisasi (Suatu Tinjauan Teoritis)

Askar 189 - 200

Pengaruh Kompetensi Manajerial Terhadap Kinerja Kepala Sekolah  
Menengah Pertama Negeri Di Kota Makassar

Mukhtar Hamzah 201 - 214

Evaluasi Pengelolaan Dana Komite untuk Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Sekolah (APBS) SMA Negeri 7 Makassar Periode 2006/2007-  
2010/2011

Abdul Majid 215 - 226

Analisis Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "SENTOSA"  
SMP Negeri 2 Unggulan Maros

Yohanis Ta'bi 227 - 238

Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah pada Praktisi Perbankan Syariah  
(Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar)

Ali Hasgar 239 - 254

# **INDEPENDENSI PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILUKADA (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Gowa)**

**Risma Niswaty**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Gowa berdasarkan prinsip independensi KPU Gowa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus penyelenggaraan pemilukada Gowa tahun 2010. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengalaman personal peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokratisasi KPU Gowa dalam hal independensi sebagai penyelenggara pemilukada belum dilaksanakan dengan baik. Ketidakindependen KPU Gowa ini ditemukan dalam aspek: Adanya campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukan penyelenggara pemilu; Pada tingkatan PPK dan PPS, intervensi pemerintah setempat menjadi semakin kuat dengan adanya ketergantungan PPK dan PPS dalam memanfaatkan sarana berupa gedung kantor dan fasilitas di dalamnya; dalam pengajuan pencalonan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, pemerintah setempat menciptakan kondisi yang membatasi peran individu tertentu.

Kata Kunci: Independensi, Pemilu

## **PENDAHULUAN**

---

### **Latar Belakang**

Pemilu yang telah sepuluh kali dilaksanakan di Indonesia, menganut azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mempunyai makna amat strategis karena merupakan langkah bersejarah dalam menciptakan kehidupan politik yang beradab. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) telah dikenal sejak zaman Orde Baru yang dimulai pada Pemilu 1971. Asas langsung dimaknai sebagai keterlibatan pemilih secara langsung untuk memberikan suaranya dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat dan memiliki hak untuk menggunakan suaranya. Asas bebas berarti pemilih dalam memberikan suaranya harus terhindar dari paksaan oleh pihak manapun. Sedangkan asas rahasia berarti pemberian suara yang dilakukan oleh pemilih hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Ketika era reformasi bergulir, asas jujur dan adil (jurdil) ditambahkan ke dalam asas luber, sehingga asas Pemilu menjadi "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" (Luber Jurdil).

Pemilu pada awalnya dilakukan untuk memilih anggota legislatif pada tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



(DPRD, baik DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada tahun 2002 dilakukan amandemen keempat terhadap UUD 1945 yang berimplikasi pada pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung. Sejak tahun 2005, sejarah pemilu di Indonesia mencatat dimulainya pemilihan untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Setelah pelaksanaan Pilkada pada tahun 2005, maka pada tahun 2010 menjadi momentum periode kedua pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Setelah disahkannya UU No.27 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan menjadikan Pilkada sebagai bagian dari Pemilu maka istilah Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Meskipun Pilkada dan Pemilukada telah memasuki periode kedua pelaksanaannya atau setara dengan sepuluh tahun, namun ternyata dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada, tetap ditemukan sejumlah persoalan. Jika permasalahan Pemilukada 2010 diinventarisir, maka secara umum tahapan yang bermasalah adalah masalah pemutakhiran data pemilih yang menimbulkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tahap pencalonan, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, serta tahap penetapan dan pelantikan calon terpilih.

Dari beberapa permasalahan dalam Pemilukada tersebut dapat dilihat dari kecenderungan maraknya tuntutan dari berbagai pasangan calon yang harus diproses oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu daerah di Sulawesi yang penyelenggaraannya digugat melalui MK maupun PTUN adalah kabupaten Gowa. Untuk Pemilukada Gowa, bukan saja harus menghadapi gugatan tersebut, melainkan KPU Gowa harus pula menghadapi sidang Dewan Kehormatan (DK) sebagai akibat dari adanya laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik. Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 10 UU No.27 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut terutama berkaitan dengan asas independensi penyelenggara Pemilukada.

#### Rumusan Masalah

Bagaimanakah peraturan Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di Gowa menunjukkan prinsip independensi penyelenggara pemilukada?

#### LANDASAN TEORI

##### Tata Kelola Pemerintahan

Untuk membangun pemerintahan yang demokratis dibutuhkan adanya akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat merupakan salah satu prasyarat bagi demokrasi yang kuat, sekalipun diakui bahwa demokrasi mengizinkan berdirinya pengelompokan dan organisasi-organisasi yang memiliki ide dan sikap yang justru bertentangan dengan perdamaian, toleransi, dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.



Khusus mengenai komisi pemilihan yang independen, dijelaskan dalam IDEA (2000: 56) bahwa komisi pemilihan independen melindungi hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Komisi ini berperan dalam mempertahankan standar di dalam proses pemilihan. Peran ini harus meliputi pemantauan langsung terhadap pemilihan presiden, regional, dan nasional. Untuk menjamin kepercayaan masyarakat, keanggotaan komisi ini harus netral (*nonpartisan*). Komisi ini harus memiliki dana dan sumber daya yang mencukupi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Komisi pemilihan independen ini sekarang secara universal diketahui penting bagi stabilitas dalam demokrasi konstitusional sebagai penentu.

Hamidi (2010: 182) menyebutkan bahwa melalui pemilihan umum rakyat akan menentukan kepada kandidat atau partai mana nantinya yang akan memegang tampuk pemerintahan. Di samping itu pemilihan umum bagi rakyat berfungsi sebagai media pelepasan ketegangan emosional dalam mengekspresikan kesetiaan kepada komunitas atau regim. Karena itu pemilihan umum sebenarnya memiliki dimensi yang terkait erat dengan kepercayaan, nilai dan harapan rakyat terhadap pemerintah. Menurut pula, hasil suatu pemilihan umum baik langsung atau tidak, besar atau kecil selalu mempunyai pengaruh terhadap semua bidang kehidupan setiap warga negara.

Sharp (1997: 91) menyebutkan bahwa system demokrasi yang baru memerlukan konstitusi untuk menegakkan kerangka pemerintahan demokratis yang dicita-citakan. Konstitusi harus menyatakan tujuan pemerintahan, batas-batas kekuasaan pemerintah, cara dan waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk menentukan pejabat dan wakil rakyat, hak-hak dasar yang melekat pada rakyat, hubungan pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat yang rendah.

Penegakan konsep *good governance* pada institusi pemerintah memerlukan *action plan* atau agenda pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Tjokroamidjojo dalam Patriadi (2004: 79), ada 5 (lima) agenda yang harus dilaksanakan, yaitu: (i) perubahan sistem politik ke arah sistem politik yang demokratis, partisipatif dan egalitarian; (ii) reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), dimana kekuatan militer harus menjadi kekuatan yang profesional dan *independent*; (iii) reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah; (iv) reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi; (v) menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Untuk itu semua aparat institusi pemerintahan (birokrasi) perlu dipikirkan secara manusiawi berkaitan dengan *wealfare system*, *manpower planning* dan penegakan hukumnya.

Demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi harus didukung dan dipertahankan lewat sistem-sistem akuntabilitas demokratis. Untuk mendukung akuntabilitas demi tercapainya demokrasi, melalui sebuah Forum untuk Reformasi Demokratis yang digagas oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IIDEA), diajukan terbentuknya 5 (lima) pranata, yaitu: ombudsman,



pemeriksa umum, komisi pemilihan yang independen, komisi hak asasi manusia, dan komisi fiskal dan keuangan.

Khusus mengenai komisi pemilihan yang independen, dijelaskan dalam ✓ IDEA (2000: 56) bahwa komisi pemilihan independen melindungi hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Komisi ini berperan dalam mempertahankan standar di dalam proses pemilihan. Peran ini harus meliputi pemantauan langsung terhadap pemilihan presiden, regional, dan nasional. Untuk menjamin kepercayaan masyarakat, keanggotaan komisi ini harus netral (*nonpartisan*). Komisi ini harus memiliki dana dan sumber daya yang mencukupi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Komisi pemilihan independen ini sekarang secara universal diketahui penting bagi stabilitas dalam demokrasi konstitusional sebagai penentu. Salah satu isu dengan kapasitas paling besar untuk melabihkan suatu masyarakat dan memicu konflik adalah hasil pemilu yang tidak dapat diterima oleh pesertanya karena mereka tidak percaya pada penyelenggara yang bertanggungjawab untuk melakukan pemilihan.

#### Demokrasi dan Kebijakan Publik

✗ Lemay (2002:11) memandang kebijakan sebagai sebuah tindakan bermakna yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan (*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem*). Tilaar dan Nugroho (2008: 184) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. Pada bagian lain, Tilaar dan Nugroho (2008: 185) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis.

Dye (1987: 43) menegaskan bahwa kebijakan publik berkenaan dengan segala hal yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah (*Public policy is whatever governments choose to or not to do*). Hal ini menyiratkan bahwa berbagai regulasi dan aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan, sedang dilakukan, akan dilakukan, maupun program-program kemasyarakatan yang belum disikapi oleh pemerintah termasuk ke dalam kategori kebijakan publik.

✓ Hal senada dikemukakan oleh Widodo (2001: 190) bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan. Sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.

✗ Analisis kebijakan menurut Sapru (2004: 53) dilakukan oleh kelompok dan masyarakat, berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: 1) permasalahan dan kaitan antara kebijakan publik dengan permasalahan-permasalahan kebijakan publik; 2) muatan dari kebijakan publik; 3) langkah-langkah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan; serta 4) peluang dan tantangan dari kebijakan yang dibuat.



Salah satu permasalahan dalam kebijakan publik adalah ketika peraturan atau sebuah kebijakan diimplementasikan di masyarakat. Perhatian terhadap permasalahan implementasi lebih awal ditunjukkan oleh penulis Douglas R. Bunker dalam penyajiannya di depan *the American Association for the Advancement of Science* pada tahun 1970. Ketika itu disajikan untuk pertama kali secara konseptual tentang proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena sosial politik (Edward III, 1984: 1). Konsep implementasi kemudian semakin marak dibicarakan, sejalan dengan semakin banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.

✓ Edwards III (1984: 1) menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

#### METODE ANALISIS

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, peneliti digunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa Observasi, pengalaman personal, wawancara, dan dokumentasi.

Pengamatan dengan pencatatan langsung (*on the spot*) atas peristiwa penelitian tidak mungkin lagi dilakukan karena Pemilu di Gowa telah selesai. Untuk membantu peneliti, maka akurasi dan kelengkapan arsip-arsip dan dokumentasi Pemilu di Gowa tahun 2010 yang masih terjaga dengan baik, sehingga masih dapat dilakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Peneliti secara personal memiliki pengalaman bekerja selama 7 (tujuh) tahun pada lembaga yang menjadi objek penelitian. Selama 7 tahun tersebut, peneliti menduduki jabatan Ketua Divisi Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih (sejak tahun 2003-2008) dan selanjutnya menjabat sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu (tahun 2008-2010). Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu mengenai: Tata cara teknis penyelenggaraan yang disusun KPU Gowa melalui berbagai regulasi pemilu; mekanisme sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan selama pelaksanaan pemilu; Tata cara perekrutan tenaga pelaksana dan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS; Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan KPU Gowa ketika terjadi permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemilu; Sistem koordinasi, pengawasan, dan pemantauan penyelenggaraan pemilu; dan Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini berupa pengumpulan data dokumenter, bahan-bahan visual, dan penelusuran data *on line*.

## PEMBAHASAN

Independensi KPU Gowa sebagai penyelenggara Pemilukada di kabupaten Gowa pada tahun 2010, dapat dilihat berdasarkan lima indikator, yaitu: 1) Bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukannya; 2) Tidak terlibat dengan partai politik/Nonpartisan; 3) Memiliki struktur yang berjenjang/ada di setiap tingkatan; dan 4) Keanggotaannya terbuka pada keragaman latar belakang pekerjaan (PNS Depdagri, Akademisi, dan jenis pekerjaan lainnya).

Terkait dengan pembentukan lembaga penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka pembentukan KPU Gowa untuk periode tahun 2008-2013 mengacu pada UU No.22 tahun 2007. Sebagai petunjuk teknis pembentukan KPU kabupaten/kota maka acuan yang digunakan adalah Peraturan KPU (PKPU) No.13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2007. PKPU tersebut merupakan implementasi dari Pasal 125 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keanggotaan Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: 1 (satu) orang yang diajukan oleh Bupati/Walikota yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; 2 (dua) orang yang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari profesional, yang penetapan calonnya dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota; dan 2 (dua) orang yang diajukan oleh KPU Provinsi yang dapat terdiri atas kombinasi dari 1 (satu) orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari profesional atau 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat. Point ini sesungguhnya ingin menyokong semangat kerja sama di antara *stakeholder* pemilukada, namun point penetapan mekanisme pengajuan timsel tersebut dalam prakteknya justru menjadi celah terciptanya dependensi terhadap bupati/walikota dan partai politik. Pengajuan keanggotaan tim seleksi melalui bupati/walikota menjadi celah bagi bupati/walikota yang masih ingin menjadi calon bupati/walikota periode kedua untuk memasukkan nama tim seleksi yang dapat melakukan koneksi politis (*political connection*) dengannya dan setidaknya memengaruhi 1 suara untuk menentukan calon anggota KPU kabupaten/kota yang akan diseleksi. Demikian pula dengan pengajuan keanggotaan timsel yang diajukan oleh DPRD kabupaten/kota. Lembaga perwakilan rakyat yang seluruh anggotanya dipilih melalui pemilu legislatif tersebut adalah unsur-unsur yang berasal dari partai politik.

Secara operasional substansi independensi yang seharusnya dilaksanakan mengalami reduksi. Reduksi independensi terjadi dengan tidak terpenuhinya calon dari unsur profesional padahal banyak tokoh profesional yang dapat dicalonkan, baik dari kabupaten Gowa maupun dari kota Makassar. Selain itu, tidak dilaksanakannya paripurna di DPRD untuk mengajukan 2 nama untuk keanggotaan timsel juga mengindikasikan bahwa nama yang diajukan oleh DPRD Gowa tidak aspiratif dan hanya merepresentasikan kepentingan pimpinan DPRD Gowa.



Dari wawancara, penelusuran dokumen, dan pengalaman personal peneliti, ditemukan data-data bahwa regulasi terkait syarat bagi penyelenggara dan pelaksana pemilu dan pilukada sudah cukup memadai untuk membatasi masuknya anggota parpol. Hal ini tentu saja dapat menjadi langkah awal penegakan independensi penyelenggara dan pelaksana pemilu dan pilukada. Namun demikian, regulasi tersebut akan lebih memenuhi prinsip independensi jika disertai dengan sanksi yang jelas.

Dengan adanya dictum yang menyebutkan bahwa KPU kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, maka KPU Gowa diwajibkan untuk membuat keputusan-keputusan yang bersifat teknis dengan mempedomani UU pilukada, PP, dan peraturan yang telah dibuat oleh KPU, serta menindaklanjuti edaran baik dari KPU maupun KPU Sulsel.

Ketentuan yang mengatur mengenai keanggotaan KPUD tersebut menyiratkan bahwa seharusnya tidak ada eksklusivitas dalam organisasi penyelenggara pemilu ini. Tidak ada celah bagi ketua untuk bertindak melebihi anggota, karena mereka memiliki hak suara yang sama dan adanya keharusan pleno dalam pengambilan keputusan dapat menjadi rambu pengendali.

Selain keterwakilan unsur, keanggotaan KPU Gowa juga mengakomodir keterwakilan gender. Hal ini tampak dari adanya 2 orang perempuan pada keanggotaan KPU Gowa periode 2003-2008 dan juga 2 orang lagi pada keanggotaan periode 2008-2013. Jika dipersentasekan maka terdapat 40 % keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Gowa.

Keterwakilan perempuan tentu saja menjadi pertimbangan khusus dalam pembentukan KPU/KPUD mengingat bahwa mereka adalah penyelenggara pemilu yang merupakan representasi demokrasi. Perlu disadari bahwa keterlibatan perempuan dalam politik adalah bagian dari penciptaan masyarakat demokratis yang berkeadilan.

## **PENUTUP**

Penerapan prinsip independensi penyelenggaraan pilukada kabupaten Gowa tahun 2010 belum dilaksanakan dengan baik. Ketidakindependenan penyelenggaraan pilukada tersebut ditemukan dalam aspek:

- a. Adanya campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukan penyelenggara pemilu. Campur tangan tersebut berupa intervensi pemerintah kabupaten dalam menyusun tim seleksi KPU Gowa periode 2003-2008; peranan camat dan kepala desa/lurah dalam mengajukan nama-nama anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- b. Secara terstruktur dan berjenjang, KPU Gowa membentuk PPK di kecamatan dan PPS di tingkat desa/kelurahan. Dalam regulasi pilukada, secara tegas telah diatur mengenai kewajiban PPK dan PPS untuk berkoordinasi dengan KPU Gowa. Namun dalam pelaksanaannya, PPK dan PPS seringkali lebih

mengedepankan koordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah. Pada tingkatan PPK dan PPS, intervensi pemerintah setempat menjadi semakin kuat dengan adanya ketergantungan PPK dan PPS dalam memanfaatkan sarana berupa gedung kantor dan fasilitas di dalamnya.

- c. Keanggotaan penyelenggara pemilu terbuka pada latar belakang pekerjaan dan unsur masyarakat, kecuali bagi individu yang terlibat sebagai anggota partai politik. Namun dalam pengajuan pencalonan di tingkat PPK, PPS, dan KPU pemerintah setempat menciptakan kondisi yang membatasi peran individu tertentu. Hal ini menyebabkan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPU adalah mereka yang dapat diatur dan patuh pada pemerintah setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barber, Benyamín. 1984. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeleth, CA.: University of California Press.
- Baxter, Joe, 'Techniques for Effective Election Management' in *Elections: Perspectives on Establishing Democratic Practices*, Geneva and New York: United Nations Department for Development Support and Management Services, 1997.
- Birch, Sarah, 2007, 'Electoral Systems and Electoral Misconduct', *Comparative Political Studies*, forthcoming, December 2007.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Publik Policy*. Englewood Cliffs. NJ.USA: Prentice-Hall.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Publik Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- IDEA. 2000. *Penilaian Demokratisasi di Indonesia: Forum untuk Reformasi Demokratis*. Jakarta: IDEA.
- . 2002. *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: IDEA.
- Patriadi, Pandu. 2004. "Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah dan BUMN dalam Kebijakan Privatisasi BUMN." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Volume 8 Nomor 3, September 2004.
- Sharp, Gene. 1997. *From Dictatorship to Democracy A Conceptual Framework for Liberation*. Diterjemahkan oleh Sugeng Bahagijo. "Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan, Kerangka Konseptual untuk Pembebasan." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing.